

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan kehutanan di Indonesia merupakan isu yang kompleks. Sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian hutan sambil memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi. Hutan Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, terutama masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Namun, seiring dengan pesatnya pembangunan dan tekanan ekonomi pengelolaan hutan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk deforestasi, degradasi lahan, dan konflik tenurial antara negara, perusahaan, dan masyarakat lokal. menjadi ancaman serius yang perlu ditangani dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, muncul pendekatan baru yang menekankan pada pelibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya hutan, salah satunya melalui skema Perhutanan Sosial (Chandra, 2025).

Perhutanan Sosial menjadi program strategis nasional dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan distribusi pemanfaatan sumberdaya hutan. Perhutanan Sosial atau *social forestry* adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, diperlukan penerapan program perhutanan sosial melalui pemberian akses legal kepada masyarakat setempat. Akses tersebut diberikan melalui berbagai skema perhutanan sosial, antara lain Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, serta Kemitraan Kehutanan (Mahardika & Muyani, 2021).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) menegaskan bahwa pembangunan HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan secara adil dan berkelanjutan, dengan tetap menempatkan kelestarian fungsi hutan serta lingkungan hidup sebagai prioritas utama. Namun demikian, permasalahan kelembagaan di tingkat lokal sering menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan berbagai subsistem pengelolaan, seperti produksi, pemasaran, dan pengolahan hasil hutan yang dikelola oleh petani, yang sangat dipengaruhi oleh penataan kelembagaan yang belum optimal (Oktoyoki et al., 2023).

Kelompok tani merupakan salah satu bentuk kelembagaan di tingkat petani yang berperan langsung dalam pengembangan unit usaha secara kolektif. Dalam kelompok tersebut terjadi interaksi dan koordinasi antaranggota yang mendukung tercapainya tujuan bersama yang lebih efektif. Keberadaan kelembagaan kelompok tani juga berfungsi sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai program, di mana kelompok memiliki aturan dan mekanisme yang disepakati bersama dalam mengelola serta memanfaatkan lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Safe'i et al., 2018).

Dinamika Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan perhutanan sosial menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian kelompok telah menunjukkan

keberhasilan dalam pelaksanaannya, namun masih banyak kelompok yang menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Permasalahan yang umum dihadapi KTH dalam pengelolaan perhutanan sosial berkaitan dengan keterbatasan kapasitas, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani berada pada posisi yang kurang berdaya (*powerless*), yang dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas (*capacity*) dan kemampuan (*capability*) yang dimiliki dalam mengelola sumber daya hutan secara optimal (Agus et al., 2024).

Kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diukur melalui indikator kemampuan manajerial, keberlanjutan kegiatan usaha, dan ketanggapan terhadap pengawasan serta pencegahan aktivitas ilegal. Di lapangan, banyak KTH yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan usaha secara profesional, terutama dalam hal mitra usaha dan pengelolaan keuangan. Sebagian besar KTH masih mengelola usaha secara tradisional atau informal, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mencapai keberlanjutan kegiatan usaha dan pengelolaan yang efisien. Strategi kelembagaan KTH harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi performa dan keberlanjutan organisasi (Pasaribu et al., 2025).

Desa Labuaja terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam implementasi Perhutanan Sosial pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Namun, juga menghadapi berbagai dinamika kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas Kelompok Tani Hutan (KTH) Bulu Tanete dalam implementasi skema Perhutanan Sosial. Dengan keberadaan hutan yang masih relatif terjaga serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan, mengharuskan pengelolaan kelembagaan KTH berfungsi secara optimal. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi efektivitas KTH Bulu Tanete dan merumuskan strategi kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bulu Tanete dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.

1.2 Landasan Teori

Pengelolaan hutan secara konvensional pada umumnya berpandangan bahwa hutan yang baik hanya dapat dikelola oleh pemerintah melalui pemberian izin konsesi kepada pemilik modal besar dengan pendekatan yang bersifat *top-down* disertai dengan minimnya keterlibatan masyarakat yang seharusnya berperan sebagai aktor utama. Padahal, keberhasilan pelaksanaan program perhutanan sosial sangat ditentukan oleh tingkat kemandirian masyarakat dalam mengelola hutan untuk memenuhi kepentingan mereka sekaligus mendukung kepentingan negara dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam upaya mengoptimalkan hasil dari implementasi perhutanan sosial, diperlukan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau lembaga lain, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran. Kebijakan perhutanan sosial pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pemberian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal dengan berbagai program pembangunan lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pelestarian lingkungan (Pambudi, 2023).

Program perhutanan sosial dalam RPJMN 2020–2024 menerapkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Keterlibatan aktif masyarakat tersebut diharapkan mampu memperkuat praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan alokasi kawasan yang cukup luas untuk pelaksanaan program perhutanan sosial, yang mencakup skema hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat (HTR), dan hutan kemasyarakatan. Penetapan kawasan tersebut memberikan hak akses kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mempertahankan fungsi ekosistemnya (Pambudi, 2023).

Kelompok Tani Hutan (KTH) memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan. Peran tersebut perlu didukung oleh keberadaan kelompok yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebersamaan, keselarasan, serta kesamaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, pemberdayaan masyarakat setempat menjadi upaya penting untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat agar mampu memperoleh manfaat dari sumber daya hutan secara optimal (Istiqomah et al., 2021).

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Kebijakan perhutanan sosial hadir sebagai alternatif dalam pengelolaan hutan yang menekankan pada keterlibatan masyarakat melalui beberapa skema pengelolaan. Salah satu skema yang diterapkan adalah Kemitraan Kehutanan yang dirancang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Skema ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola lahan pada kawasan hutan yang telah dibebani hak atau berada dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta membuka akses pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan (Lispiani & Hidayati, 2022).

Pengelolaan hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab Perhutani, tetapi juga melibatkan berbagai aktor, seperti masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak terkait lainnya. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan adanya pendekatan bottom-up dalam pembangunan sektor kehutanan. Salah satu pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah pemerintah desa. LMDH menjalin kerja sama dengan Perhutani melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang bertujuan untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya hutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan profesional. Dalam perkembangannya, kelembagaan masyarakat desa hutan mengalami transformasi menjadi lembaga yang dibentuk sebagai wadah kerja sama dalam pengelolaan sumber daya hutan guna mengatur serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui interaksi yang erat dengan kawasan hutan. Proses pengembangan kelembagaan masyarakat desa hutan melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota dan pengurus LMDH, pemerintah daerah, investor, perguruan tinggi, serta fasilitator dari masyarakat maupun pihak eksternal lainnya (Anggiani & Hikmawan, 2022).

Strategi penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola organisasi, serta perluasan jejaring kemitraan dengan pemerintah maupun pihak swasta. Upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas manajerial, pengembangan usaha produktif berbasis hasil hutan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kelompok. Keberhasilan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepemimpinan dan kapasitas organisasi, serta faktor eksternal berupa dukungan kebijakan, akses pasar, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi kelembagaan perlu dirumuskan secara komprehensif dan kontekstual (Ruhimat, 2021).

Keberlanjutan kelembagaan KTH sangat tergantung pada kekuatan aspek kelembagaan itu sendiri, termasuk struktur organisasi, aturan-norma internal, kapasitas partisipatif anggotanya, serta keterlibatan dalam jaringan eksternal. Penelitian di Kampar, misalnya, menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bisnis memberikan pengaruh paling signifikan terhadap kesejahteraan anggota KTH, diikuti oleh aspek kelembagaan dan pengelolaan Kawasan (Oktoyoki et al., 2023). Dengan demikian, strategi kelembagaan KTH Bulu Tanete sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Strategi tersebut juga memastikan adaptasi terhadap tantangan sosial dan lingkungan sehingga mendukung program kehutanan secara efektif dan Berkelanjutan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas Kelompok Tani Hutan (KTH) Bulu Tanete dalam mendorong program Perhutanan Sosial.
2. Merumuskan strategi kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bulu Tanete dalam keberlanjutan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kelembagaan KTH Bulu Tanete dengan analisis strategis yang sesuai dengan dinamika internal dan eksternal terhadap keberlanjutan kelembagaan. Hasil penelitian berguna sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi, manajemen, dan partisipasi anggota dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat bagi KTH, pendamping, maupun pihak terkait sebagai rujukan dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada rentan waktu Oktober sampai dengan Desember 2025, yang terdiri atas dua tahapan, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisis data. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2025 berlokasi di Dusun Pattiro, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Kamera digital, digunakan sebagai alat dokumentasi selama kegiatan di lapangan.
2. Alat tulis, digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari responden.
3. Perekam suara, digunakan untuk merekam percakapan saat proses wawancara berlangsung terhadap responden.
4. Laptop, digunakan untuk mengolah dan menganalisis data hasil wawancara.
5. Kuisisioner wawancara, digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti dalam menyusun dan mengajukan pertanyaan secara sistematis kepada responden.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Bulu Tanete yang berada di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Penentuan sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian

2.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer, diperoleh langsung dari lapangan melalui hasil wawancara mendalam dengan anggota KTH Bulu Tanete di Desa Labuaja, serta pihak terkait. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi kelembagaan KTH.
2. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen kelembagaan dari instansi atau pihak terkait mengenai kondisi kelembagaan KTH.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi Kelompok Tani Hutan (KTH) Bulu Tanete dalam implementasi skema Perhutanan Sosial, baik dalam kegiatan pengelolaan areal Hutan maupun dalam kegiatan kelompok. Observasi

ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program dan partisipasi anggota, serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat terkait pengelolaan hutan sosial.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pengurus, anggota KTH, serta pihak terkait. Wawancara bersifat terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuisioner wawancara agar tetap fleksibel dan memungkinkan pengembangan pertanyaan berdasarkan jawaban responden. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang dinamika KTH yang ada dan faktor yang mempengaruhi implementasinya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi yang berkaitan dengan KTH Bulu Tanete seperti laporan kegiatan, notulen rapat, SK pengelolaan hutan dan data pendukung lain yang berkaitan. Teknik ini bertujuan memperkuat data primer dan memberikan bukti pendukung terhadap hasil penelitian.

2.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan memadukan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi kelembagaan serta merumuskan strategi pengembangannya secara sistematis yang terdiri dari:

2.6.1 Kondisi Kelembagaan KTH Bulu Tanete

Analisis skala Likert digunakan untuk mengolah data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner. Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, dan penilaian responden terhadap kondisi kelembagaan KTH Bulu Tanete. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap individu dengan meminta responden menyatakan tingkat persetujuan terhadap sejumlah pernyataan yang disajikan dalam bentuk skala bertingkat (Simamora, 2022). Kondisi kelembagaan ini digunakan untuk merumuskan analisis SWOT berdasarkan persepsi anggota KTH pada beberapa indikator pada rentang nilai skala 1 sampai 5 dengan tingkat kategori yang digunakan dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Setiap indikator kelembagaan terdiri dari beberapa pernyataan, sehingga skor yang diperoleh merupakan akumulasi dari seluruh pernyataan dalam satu indikator. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap masing-masing aspek kelembagaan.

Analisis Skala Likert ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan persepsi dan sikap responden terkait faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam KTH. Data yang diperoleh melalui pengisian kuesioner kemudian diolah dengan menjumlahkan skor dari setiap responden pada masing-masing pernyataan. Nilai total tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung rata-rata skor dan indeks persentase yang merepresentasikan tingkat intensitas peran kelembagaan menurut persepsi anggota kelompok, kemudian dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut: (Pawarrang et al., 2025).

- a. $Skor\ Total = \Sigma(Jumlah\ responden + jumlah\ nilai\ indikator\ variabel)$
- b. $Skor\ Maksimum = Jumlah\ pernyataan\ per\ variabel \times Jumlah\ responden \times 5$
- c. $Indeks\ Persentase = \frac{Skor\ Maks(X)}{skor\ total(Y)} \times 100\%$

Nilai persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori kondisi kelembagaan yang disajikan pada tabel.1 mengenai Tingkat Kondisi Kelembagaan KTH.

Tabel.1 Tingkat Kondisi Kelembagaan

Persentase (%)	Kategori
0–20%	Sangat Lemah
21–40%	Lemah
41 – 60 %	Cukup kuat
61 – 80 %	Kuat
81 – 100 %	Sangat Kuat

(Sumber: Pawarrang et al., 2025).

2.6.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi kelembagaan KTH Bulu Tanete. Menurut Saniati et al., (2017) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal pada satu sisi, serta peluang dan ancaman eksternal pada sisi yang lain. Penyusunan strategi SWOT berdasarkan faktor – faktor strategi eksternal dan internal yang ada. Dari analisis SWOT tersebut akan mendapatkan empat strategi yaitu strategi SO (*Strength–Opportunities*), ST (*Strength– Threats*), WO (*Weaknes – Opportunities*) dan WT (*Weaknes – Threats*).

Tabel 2. Matriks SWOT

Internal Eksternal	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	Opportunities (O)	Treaths (T)
	Strategi S-O	Strategi W-O
	Strategi S-T	Strategi W-T

(Sumber: Azizah et al., 2021)